

Pendidikan Multikultural Antara NU dan Muhammadiyah

Kasman, Makhrus

UIN KH Achmad Siddiq Jember

UIN KH Achmad Siddiq Jember

Keywords:

Pendidikan
multikultural,
pesantren, NU,
Muhammadiyah

***Correspondence**

Address:

[mas.makhrus@
gmail.com](mailto:mas.makhrus@gmail.com)

Abstract: The emergence of a religious climate that does not reflect of multiculturalism and pluralism lately, which is marked by the strengthening of radical, exclusive, intolerant attitudes and behaviors in responding to others, along with theological racism, raises big questions about the role of pesantren in maintaining religious pluralism. Based on above reality, this research focuses on comparing two Islamic boarding schools, NU and Muhammadiyah, in Jember, related to the construction of multicultural education development, which includes the ideas related to the significance of multicultural education, and the response to the implementation of multicultural education in the education system of NU and Muhammadiyah pesantren. The results of this research, both the Al-Qodiri Islamic Boarding School or the Pakusari Muhammadiyah Islamic Boarding School see the need for multicultural education, but how to apply it, there are differences between them. Although in general the Al-Qodiri Islamic Boarding School and the Modern Muhammadiyah Islamic Boarding School respond well to multicultural education, both have different response to the implementation of multicultural education values.

Abstrak: Munculnya iklim keberagaman umat yang tidak mencerminkan sikap multikulturalisme dan pluralisme akhir-akhir ini yang ditandai oleh menguatnya sikap dan perilaku yang radikal, eksklusif, intoleran dalam menyikapi perbedaan (the aothres), dan rasisme teologis, menimbulkan pertanyaan besar terhadap peran pesantren dalam menjaga pluralisme keberagaman. Bertolak dari realitas di atas, penelitian ini fokus mengkomparasikan dua lembaga Pendidikan pesantren, NU dan Muhammadiyah, di Jember, terkait dengan konstruksi pengembangan pendidikan multikultural, yang meliputi Gagasan terkait dengan signifikansi pendidikan multikultural, dan respon implementasi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan pesantren NU dan Muhammadiyah. Hasil analisa dari data-data yang terkumpul dan dideskripsikan, Baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang perlunya pendidikan multikultural, namun bagaimana cara menerapkannya, terdapat perbedaan antara keduanya. Walaupun secara umum Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah merespon baik pendidikan multikultural, namun keduanya mempunyai respon implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural yang tidak selalu sama.

PENDAHULUAN

Multikulturalisme dan pluralisme merupakan dua isu penting, --di samping isu-isu besar lainnya seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), terorisme, dan eco-feminisme--, yang mewarnai diskursus publik (*public discourses*) dalam dua dasa warsa terakhir ini. Pengarusutamaan diskursus mengenai kedua isu itu pun menjadi semakin aktual manakala dikaitkan dengan pesantren dan dinamika pendidikan agama yang dikembangkannya. Ada beberapa argumentasi mendasar yang dapat diajukan untuk menjelaskannya, di antaranya adalah bahwa dalam struktur kekerasan yang diproduksi oleh sistem sosial bernama "globalisasi" dengan wataknya yang dominatif, hegemonik dan eksploitatif,¹ hampir dapat dipastikan, elemen keagamaan terseret di dalamnya. Banyak kasus yang dapat dirujuk, seperti peristiwa peledakan bom Bali, pengeboman Hotel J.W. Marriot, peledakan bom di Kuningan, sampai pada aksi kekerasan terhadap Jama'ah Ahmadiyah yang *nota bene* pelakunya adalah dari kalangan santri (umat Islam) atau bahkan santri dari suatu pesantren. Kondisi semacam ini, jelas, sangat memprihatinkan karena dapat mengancam rusaknya ekologi sosial pluralitas keberagaman umat dan sekaligus eksistensi bangsa Indonesia sebagai *locus classicus*, tempat klasik dari pluralisme.²

¹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2002)., 204.

² Ahmad Suaedy, ed., *Pergulatan Pesantren Dan Demokratisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000)., 169.

Pesantren, sebagai sub-kultur pendidikan di tanah air sudah semestinya memiliki perhatian tersendiri dalam menjaga dan meruwat ekologi pluralisme keberagaman tersebut agar tetap kondusif. Sebab, perkembangan keberagaman umat tidak bisa dilepaskan dari peran yang dilakukan pesantren selama ini, baik melalui peran pendidikan, dakwah, dan transformasi sosialnya (*social transformation*) yang ketiganya merupakan potensi riil yang selama ini dimiliki pesantren. Menurut Ismail SM, melalui ketiga elemen tersebut, pesantren berpotensi besar untuk memberikan kontribusinya dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat.³

Terkait dengan iklim keberagaman umat yang ditandai oleh menguatnya sikap dan perilaku yang radikal, eksklusif, intoleran dalam menyikapi perbedaan (*the aothres*), dan rasisme teologis, dalam hal ini tentunya menjadi sesuatu yang niscaya apabila dipertanyakan peran pesantren, khususnya melalui potensi pendidikan yang dijalankannya. Mungkinkah format dan praktek pendidikan yang dilaksanakan pesantren selama ini kurang tepat sehingga tidak cukup *favourable* dalam pengembangan sikap dan perilaku keberagaman umat yang inklusif? Boleh jadi ya. Setidaknya fenomena ini dapat dicermati dari pemikiran (cara pandang) dan praksis gerakan sosial keagamaan yang dirtikulasikan pesantren. Tidak sedikit pesantren yang belum memiliki cara pandang yang inklusif terhadap realitas

³ Ismail SM, *Dinamika Pesantren Dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

pluralisme keberagamaan. Meskipun tokoh-tokoh pesantren memahami benar ayat, misalnya, *ikhtilaf al-a'immah rahmatun*, namun kenyataannya pada tataran praktis belum atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁴

Bertolak dari realitas di atas, tidak diragukan lagi, bahwa masih ada semacam *something wrong* dalam praksis pendidikan yang selama ini dilakukan pesantren. Apabila format pendidikan yang dikembangkan pesantren masih sarat dengan bias teologis, pembelajaran yang dogmatis, pembacaan teks-teks keagamaan yang tekstualis/literalis, desain kurikulum yang monolitik, maka pola pendidikan yang dikembangkannya jelas tidak akan cukup konstruktif dalam mengembangkan kerukunan umat beragamayang plural dan multikultural (*multicultural society*). Pola pendidikan agama yang intoleran terhadap realitas pluralisme keberagamaan hanya akan membawa benturan antar kelompok (*conflict of inter group*) dan memerosokkan umat dalam lingkaran struktur kekerasan sosial. Dalam konteks perkembangan sosial yang semakin cepat dan transparan akibat keberhasilan globalisasi mendekonstruksi sekat-sekat eksklusivisme hingga menjadikan realitas sosial di mana perbedaan begitu telanjang,⁵ maka diperlukan rekonstruksi pola pendidikan pesantren yang lebih diorientasikan pada penguatan keberagamaan umat dengan nilai-nilai universalisme

keagamaan dan kemanusiaan seperti sikap inklusif, toleran, empatif, dan pluralistik. Dengan kata lain, pesantren sudah saatnya mengembangkan konstruksi pendidikan agama yang berwawasan multikultural. Tepat apa yang dikatakan M. Amin Abdullah, bahwa kenyataan pluralisme agama, budaya dan etnik sampai saat ini belum disadari benar oleh sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang riil, nyata. Pluralitas belum menjadi kesadaran kolektif umat yang memungkinkan untuk hidup secara damai, berdampingan, dan pro-eksistensif. Yang ada masih sebatas pluralitas semu, dialog semu, pengakuan semu dan semacamnya.⁶

Dalam kaitan ini, idealnya pesantren, melalui agenda pendidikan multikulturalnya, dituntut untuk piawai memberdayakan umat agar memiliki kedewasaan dan kesadaran untuk saling mengakui perbedaan, saling menghargai dan menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap tumbuh dan berkembangnya keragaman keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya. Konstruksi masyarakat agama yang betul-betul *civil*, menurut Hefener,⁷ tidak sebatas dicirikan oleh adanya sikap yang ramah yang mengakui dan menerima perbedaan pendapat, perbedaan agama, suku, dan semacamnya, melainkan juga harus memiliki organisasi persatuan yang kokoh.

⁴ Suaedy, *Pergulatan Pesantren Dan Demokratisasi*, 213.

⁵ Mun'in A. Sirry, *Membendung Militansi Agama Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003), 58.

⁶ M. Amin Abdullah, "Kebenaran, Dan Relativitas Sebuah Pengantar," in *Agama Dalam Bayang-Bayang Relativisme Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim Tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif*, ed. Gregory Baum (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), xxii.

⁷ Suaedy, *Pergulatan Pesantren Dan Demokratisasi*, 177.

Dan semangat yang paling penting dari multikulturalisme itu adalah *living together as one society*.⁸

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Hakikat Pendidikan Multikultural

Akar kata yang dapat digunakan untuk memahami multikultural adalah kata "kultur". Dalam catatan M. Ainul Yaqin, ada cukup banyak ilmuwan dunia yang memberikan definisi kultur, beberapa diantaranya dapat disebutkan di sini adalah: Elizabeth B. Taylor yang mengartikan kultur sebagai sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Emile Durkheim menjelaskan bahwa kultur adalah sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat di dalam sebuah masyarakat untuk diterapkan. Stephen Tyler mendefinisikan kultur sebagai sebuah alat yang mengatur mental yang dapat menentukan bagaimana seorang anggota sebuah kelompok masyarakat memahami dunianya. Clifford Geertz berpendapat bahwa kultur adalah sebuah cara yang dipakai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami siapa diri mereka dan untuk memberi arti pada kehidupan mereka. Serta masih banyak definisi-definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli.⁹

Walaupun pengertian kultur sedemikian beragam, namun pada

prinsipnya tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Kesemuanya mengindikasikan maksud yang sama, multikultural menunjuk pada fakta keragaman. Dari konsep multikultural inilah kemudian muncul gagasan normatif mengenai kerukunan, toleransi, saling menghargai perbedaan dan hak masing-masing kebudayaan suatu bangsa.

Sebagaimana halnya definisi multikultural yang beragam, para ilmuwan juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang konsep pendidikan multikultural. Setidaknya ada dua kelompok pendapat, yang akan bisa kita pahami perbedaan dasarnya dengan dua macam pertanyaan, yang sepertinya serupa namun hakekatnya bermakna dan berimplikasi berbeda. Dua pertanyaan itu adalah, pertama, "Dengan kondisi peserta didik yang multikultural, bagaimana cara mengajarnya?", dan pertanyaan kedua, "Bagaimana cara mengajarkan pada peserta didik agar kelak mereka mempunyai karakter multikultural?"

Dua jenis pertanyaan itu setidaknya menunjukkan perbedaan dalam dua hal: urgensi dan orientasi. Dalam hal urgensi, pertanyaan jenis pertama mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural hanya perlu jika kondisi peserta didiknya berasal dari latarbelakang kultur yang beragam; sedangkan pertanyaan jenis kedua tidak demikian, pendidikan multikultural diperlukan untuk semua kondisi. Demikian juga dalam hal orientasi, pertanyaan jenis pertama mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural bertujuan agar proses pendidikan tidak diganggu oleh realitas keberagaman latar belakang kultur peserta didiknya; sementara pertanyaan jenis kedua tidak bermakna demikian, proses

⁸ Dawam Pribadi and Jamali Sahrodi, "Pendidikan Multikultural: Menggagas Kedamaian Ragam Potensi Dan Komunitas Pendidikan," *Lektur Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2005)., 118.

⁹ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 27-28.

pendidikan harus melahirkan insan yang mempunyai karakter multikultural, sehingga kemudian mampu hidup rukun dan saling menghormati dalam realitas masyarakat multikultural.

Di antara definisi tentang pendidikan multikultural yang esensinya sebagaimana pertanyaan jenis pertama di atas adalah pendapat James A. Banks. Menurut Banks, pendidikan multikultural adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar didalam kelas.¹⁰ Sedangkan definisi yang sesuai dengan pertanyaan kedua adalah yang dikemukakan Ruriko Okada, bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural.¹¹

Nilai-nilai Pendidikan Multikultural

Pada bulan Oktober 1994 UNESCO di Jenewa merekomendasikan, dalam pendidikan multikultural setidaknya harus memuat beberapa pesan. Di antara rekomendasi adalah:

Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan

kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.¹²

Berdasar rekomendasi tersebut, didapati beberapa nilai multikultural dalam pendidikan, yaitu:

1. Nilai Toleransi

Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat-sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki orang lain. Selain itu, toleransi juga bisa dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian (pandangan, pendapat, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) orang lain yang bertentangan dengan kita. Atau dengan kata lain, hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dan saling

¹⁰ James A. Banks and Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (Boston: Allyn and Bacon, 1989), 2.

¹¹ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 108.

¹² Salmiati, "Urgensi Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural," *Jurnal Al-Ta'lim* 20, no. 1 (2013): 38.

menghargai di antara keragaman (*mutual respect*).¹³

Namun perlu digarisbawahi di sini, toleransi dalam hal keagamaan bukan dimaknai sebagai sikap menerima ajaran agama- agama lain, seperti dalam hal kepercayaan. Melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk satu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama. Sebagai umat yang beragama, diharapkan dapat membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang toleran dan transformatif.¹⁴ Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui kebenaran agama mereka, melainkan pengakuan terhadap agama mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikap kopromi atau kerjasama sama dalam keyakinan dan ibadah.

2. Nilai Demokrasi/kebebasan

Jika dilihat dari konteks kesejarahannya, konsep –demokrasi ini pertama kali muncul di Yunani dan Athena, yaitu pada tahun 450 SM dan 350 SM. Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang ternama dari Athena yang juga seorang negarawan ternama, mendefinisikan demokrasi dalam beberapa kriteria: (1) pemerintah oleh rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas sebuah bakat, minat, keinginan dan pandangan;

serta (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk menemui dan mengekspresikan kepribadian individual.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah demokrasi ini pun terus berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, demokrasi tetap mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

Jika nilai demokrasi ini dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar antara pendidik dan peserta didik, serta keterlibatan lembaga pendidikan.

3. Nilai Kesamaan/kesetaraan

Kesetaraan yang memiliki kata dasar setara bisa disinonimkan dengan kesederajatan yang mempunyai kata dasar sederajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sederajat ini memiliki arti sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan kata lain, kesetaraan atau kesederajatan ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain.

Kemudian, jika nilai ini dimasukkan ke dalam pendidikan adalah adanya proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta didik satu lebih spesial dari peserta didik lainnya, atau sebaliknya menjadikan salah satu peserta didik

¹³ Moh. Yamin and Vivi Aulia, *Meretas Pendidikan Toleransi; Pluralisme Dan Multikulturalisme Sebuah Keniscayaan Peradaban* (Malang: Madani Media, 2011), 6.

¹⁴ Nurcholis Madjid, *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), 39.

lebih rendah dari peserta didik lainnya dengan alasan apa pun. Apakah itu terkait dengan fasilitas yang diberikan atau pun perlakuan dari pendidik atau lembaga pendidikan itu sendiri.

4. Nilai Keadilan

Keadilan memiliki kata dasar adil, atau yang dalam bahasa Arab adalah kata *adl*. Kata ini memiliki arti sama atau seimbang. Yang berarti pengakuan dan perlakuan yang sama antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita juga wajib mempertahankan hak hidup ini dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Karena bagaimana pun orang lain juga demikian, memiliki hak hidup seperti kita. Jika kita mengakui hak hidup orang lain, maka sudah selayaknya juga bagi kita untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, adil itu adalah bentuk dari keseimbangan dan keharmonisan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban, termasuk dalam memberikan kesempatan yang lain untuk menuntut hak dan menjalankan kewajibannya.

Dalam hal ini, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Misalnya, semua peserta didik dengan kompetensi yang sama berhak mendapatkan nilai yang sama dalam mata pelajaran yang sama. Selain itu, keadilan juga bisa diartikan dengan memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan porsi kebutuhannya. Sebagai contoh, dalam pendidikan, orang tua bisa dikatakan adil jika dalam pembiayaan

pendidikan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing, meskipun secara nominal masing-masing anak tidak sama jumlahnya. Karena dalam hal ini, definisi adil yang berlaku adalah adil sesuai dengan porsinya, bukan adil yang membagi sama banyak seperti definisinya yang pertama.

Jika keempat nilai tersebut benar-benar ingin diberikan dalam pendidikan multikultural, maka setidaknya diperlukan indikator yang selain bertujuan untuk pedoman pengimplementasian nilai-nilai tersebut, juga bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah pendidikan yang telah dilaksanakan itu sudah memuat nilai-nilai multikultural di atas atau belum. Berikut akan dipaparkan indikator dari setiap nilai-nilai multikultural dalam pendidikan:

Tabel Indikator Nilai-nilai Pendidikan Multikultural

No	Nilai-nilai Multikultural	Indikator
1	Nilai Toleransi	Sikap menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian (pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya).
2	Nilai Demokrasi	Sikap menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian (pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya).

3	Nilai Kesetaraan	Sama tingkatan (kedudukan, pangkat), menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain.
4	Nilai Keadilan	Keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*.

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pakusari Jember. Kedua Lembaga tersebut dipilih karena dianggap representatif untuk mewakili Pesantren Tradisional dan Pesantren Modern di Jember, karena pertimbangan pengaruh Pondok Pesantren Al-Qodiri yang kuat dalam masyarakat Nahdhiyin, demikian pula pengaruh Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pakusari terhadap warga Muhammadiyah Jember.

Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai infoman antara lain: (1) pengasuh pondok pesantren, (2) pengurus pondok pesantren, (3) dewan ustadz, (4) dan para santri.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teknik wawancara, dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode campuran (semi struktur), yaitu mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Adapun pertanyaan pokok dalam wawancara ini antara lain: (1) bagaimana gagasan Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pakusari Jember terkait dengan signifikansi pendidikan multikultural sebagai alternatif dalam mengembangkan pemikiran pluralis multikultural di pesantren; (2) dan bagaimana nilai-nilai pendidikan multikultural yang mencakup toleransi, demokrasi, kesetaraan dan keadilan diimplementasikan dalam sistem Pendidikan Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pakusari Jember?. Tekni berikutnya adalah dokumentasi dan observasi.

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data dilakukan.

Perbandingan Gagasan Pesantren Nu Dan Muhammdiyah Terkait Dengan Signifikansi Pendidikan Multikultural Di Lingkungan Pesantren

Pondok Pesanten Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, walaupun keduanya sama sebagai lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren, namun

mempunyai latar belakang sosial dan kultural yang berbeda. Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari berada di bawah Organisasi Muhammadiyah yang terkenal modern, reformis, dan menekankan gerakan pembaruan, sedangkan Pondok Pesantren Al-Qodiri berangkat dari kultur NU yang dikenal sangat kuat dalam memegang tradisi. Adanya perbedaan latar belakang tersebut mestinya akan menimbulkan perbedaan dalam pemikiran dan gagasan.

Praktisi pendidikan di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari memandang perlunya pendidikan multikultural di pesantren, karena dalam kenyataan hidup di Indonesia, masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama. Pesantren memandang perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural, misalnya toleransi, demokrasi, kesetaraan dan keadilan, karena bila santri sudah pulang dari pesantren, masyarakat yang akan dihadapi nantinya tidak homogen, tetapi heterogen, baik adat istiadat, budaya, agama dan perbedaan lainnya. Pluralitas merupakan keniscayaan realitas yang tidak mungkin dapat dielakkan.

Pemikiran yang sama menjadi alasan bagi Pondok Pesantren Al-Qodiri memandang perlu diterapkannya pendidikan multikultural. Untuk mewujudkan kehidupan yang damai tanpa adanya konflik sosial, pendidikan multikultural perlu diajarkan ke santri. Semangat multikultural Pesantren Al-Qodiri tercermin pada lambang pesantren, dalam bentuk pita setengah lingkaran yang diartikan sebagai sikap mental yang terbuka dan mudah menerima saran,

pendapat, kritik, dan sebagainya yang datang dari mana saja.

Dalam menerapkan pendidikan multikultural tersebut, usaha yang sudah dilakukan di Pesantren Al-Qodiri adalah dengan menyelipkannya pada mata pelajaran yang ada, kegiatan-kegiatan pesantren, dan keteladanan kyai. Karena dianggap pentingnya pendidikan multikultural ini, maka bagi praktisi pendidikan Pesantren Al-Qodiri perlu disusun buku khusus tentang pendidikan multikultural yang nantinya akan diajarkan kepada santri dalam mata pelajaran yang khusus pula.

Beda halnya dengan praktisi pendidikan di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari. Bagi mereka, walaupun nilai-nilai pendidikan multikultural penting diajarkan, namun tetapi tidak perlu menggunakan istilah multikultural, apalagi ada mata pelajaran pendidikan multikultural. Yang terpenting bagi mereka bagaimana nilai-nilai pendidikan multikultural tersebut dapat tersampaikan dan tertanamkan kepada para santri secara baik. Nilai-nilai pendidikan multikultural cukup diajarkan dengan menyelipkannya pada mata pelajaran-mata pelajaran yang sudah ada, melatihkannya pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, menanamkannya pada interkasi kehidupan sehari-hari, atau melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Berdasar diskripsi di atas dapat disimpulkan, baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang penting pendidikan multikultural, dan menganggap perlu untuk diajarkan di pesantren. Pemikiran tersebut karena realitas kehidupan, seseorang pasti akan bersinggungan dengan berbagai

macam perbedaan. Namun bagaimana cara menerapkannya, terdapat perbedaan antara keduanya. Bagi Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, pengajaran pendidikan multikultural cukup dengan menyelipkannya pada mata pelajaran-mata pelajaran yang sudah ada, melatihkannya pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan menanamkannya pada interaksi kehidupan sehari-hari. Namun bagi Pondok Pesantren Al-Qodiri, di samping cara di atas perlu disusun buku khusus tentang pendidikan multikultural yang nantinya akan diajarkan kepada santri dalam mata pelajaran yang khusus pula.

Perbandingan Respon Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural

1. Toleransi

Berdasar respon yang diberikan oleh para praktisi pendidikan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari terhadap implementasi nilai toleransi dalam pendidikan di pesantren, secara umum mereka meresponnya secara positif. Hanya saja, dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka memberikan rambu-rambu. Toleransi beragama berdasar pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Q.S. al-Baqarah: 256). Toleransi antar agama tidak boleh sampai mengakui kebenaran agama lain, apalagi sampai bekerjasama dan kompromi dalam keyakinan dan ibadah agama lain. Sedangkan toleransi terhadap sesama muslim yang memiliki pandangan dan amaliah keagamaan yang berbeda dapat diajarkan kepada para santri, dengan penekanan perlunya berpegang kepada dalil yang lebih kuat. Baik toleransi seagama maupun

antar agama, sama-sama hanya bisa diajarkan dalam wujud wawasan dalam materi-materi pelajaran atau diskusi-diskusi, tidak bisa dipraktekkan di pesantren. Sedangkan toleransi terhadap perbedaan budaya dan adat istiadat dapat dilakukan dalam bentuk materi-materi pelajaran/diskusi maupun praktik, sepanjang budaya atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat.

Demikian halnya dengan praktisi pendidikan di Pondok Pesantren Al-Qodiri, secara umum merespon dengan baik adanya pembelajaran nilai toleransi dalam pendidikan pesantren. Dalam mensikapi perbedaan antara agama mereka berpedoman pada ayat ke-55 surat al-Qashash "*lanaa a'malunaa wa lakum a'maalukum*" (bagi kami amal kami, dan bagi kalian amal kalian). Diyakini bahwa ajaran Islam lah yang benar, namun demikian bukan jaminan amal orang muslim akan diterima Allah dan amal non-muslim akan ditolak. Adapun toleransi terhadap aliran yang berbeda dalam agama Islam, praktisi pendidikan Pondok Pesantren Al-Qodiri berpandangan bahwa ajaran *Ahlu Sunnah wal Jamaah* lah yang paling benar. Walaupun sebagai warga negara Indonesia mereka dapat menerima keberadaan aliran-aliran tersebut, namun respon yang diberikan kurang baik. Sedangkan toleransi pada suku, budaya, dan golongan yang berbeda, dilaksanakan dan diterapkan dengan sangat baik di Pesantren Al-Qodiri.

Berdasar deskripsi di atas dapat disimpulkan, secara umum Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari merespon positif pembelajaran nilai toleransi di pesantren. Namun dalam kaitan

toleransi antar umat beragama respon yang diberikan Pondok Pesantren Al-Qodiri dinilai lebih baik. Sebaliknya dalam kaitan toleransi antar aliran dalam sesama umat beragama Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari dinilai lebih baik. Sedangkan toleransi terkait perbedaan suku, budaya, dan golongan yang berbeda dinilai sama-sama baiknya.

2. Demokrasi

Terkait respon terhadap nilai demokrasi, praktisi pendidikan di Pondok Pesantren Al-Qodiri tidak menolaknya, walaupun praktik demokrasi tidak bisa diterapkan secara utuh di sana, terutama dalam menentukan siapa yang akan menduduki posisi-posisi strategis di kepengurusan pusat Yayasan Al-Qodiri. Posisi-posisi strategis di Yayasan Al-Qodiri kebanyakan ditempati oleh keluarga pengasuh. Penyerahan posisi-posisi strategis kepada keluarga pengasuh adalah dengan pertimbangan supaya kepengurusan pesantren menjadi stabil. Karena orang akan lebih mengikuti instruksi dari keluarga kyai, dari pada orang yang tidak punya hubungan kerabat sama sekali dengan kyai. Selain itu, karena pesantren adalah milik kyai, maka dianggap dia punya hak menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkannya.

Berbeda dengan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari. Secara umum mereka merespon positif dan menerapkan praktik demokrasi di pesantren dengan baik. Dalam penentuan siapa yang akan menduduki posisi penting di pesantren dari pengasuh pesantren sampai organisasi santri ditetapkan dengan musyawarah atau pemilihan berdasar suara terbanyak, bukan dari

keinginan pribadi satu orang. Mereka menerima demokrasi, sepanjang nilai-nilai demokrasi itu dibolehkan oleh agama.

Berdasar diskripsi di atas, walaupun Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari pada dasarnya tidak menolak nilai-nilai demokrasi, namun respon dan penerapan demokrasi di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari dinilai lebih baik.

3. Persamaan/kesetaraan

Dalam merespon nilai persamaan/kesetaraan, Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari merespon sangat positif terhadap pemberian wawasan kesetaraan dalam pendidikan di pesantren. Respon itu didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang memandang semua manusia adalah sama, sederajat dan setara. Yang membedakan adalah persoalan ketakwaan. Karena pembedanya adalah ketakwaan, berarti hanya Allah yang bisa membedakan. Manusia terhadap manusia yang lain tidak bisa mengukur ketakwaan seseorang, dan karena itu manusia yang satu harus memandang sama terhadap manusia lainnya. Nilai-nilai kesetaraan ini tidak hanya ditanamkan berupa materi-materi pelajaran, tetapi juga diinternalisasikan melalui praktik langsung dalam wujud pemberlakuan yang sama dalam mentaati peraturan dan pemberian hak yang sama kepada semua santri yang memenuhi syarat untuk menjadi pengurus di organisasi santri..

Demikian halnya dengan Pondok Pesantren Al-Qodiri, mereka menyambutnya dengan sangat positif. Pesantren Al-Qodiri mempunyai slogan: *al-syaraf la bi al-nasab wa lakin bi al-ta'ab* (kemulyaan diperoleh bukan karena keturunan,

akan tetapi kemulyaan bisa diperoleh karena jerih payah dan usaha yang dilakukan). Dari situ dapat dipahami bahwa bagi Pondok Pesantren Al-Qodiri, semua manusia pada dasarnya setara. Ketika lahir, seseorang tidak lebih mulia kedudukannya dari yang lainnya. Kemulyaan tidak datang dari nasab keluarga seseorang lahir. Tetapi dengan kerja keras dan amal perbuatan yang dilakukan lah yang membuat seseorang mempunyai kedudukan yang tinggi dari yang lain.

Berdasar diskripsi di atas dapat disimpulkan, baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang penting nilai persamaan dalam pembelajaran di pesantren. Kedua pesantren tersebut dinilai merespon dan menerapkan nilai persamaan dengan baik.

4. Keadilan

Bagi praktisi pendidikan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, nilai-nilai keadilan perlu ditanamkan kepada para santri. Argumentasi perlunya penanaman nilai-nilai keadilan adalah agar para santri dapat menghadapi secara bijaksana terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya kelak. Selain itu, keadilan adalah bagian penting dari ajaran Islam, maka pesantren harus mengembangkan nilai-nilai keadilan dalam pendidikannya. Penerapan nilai-nilai keadilan banyak terdapat dalam tema-tema kurikulum yang ada. Selain itu, internalisasi nilai-nilai keadilan dilakukan melalui praktik kehidupan sehari-hari di pesantren. Semua santri mendapatkan haknya secara adil seimbang dengan kewajiban yang dikerjakannya.

Demikian halnya dengan Pondok Pesantren Al-Qodiri. Bagi mereka, keadilan merupakan salah

satu ajaran penting dalam Islam, dan merupakan kewajiban muslim untuk melaksanakannya. Keadilan juga merupakan salah satu nilai utama dalam dasar negara Indonesia. Karena pentingnya nilai keadilan tersebut, maka dalam beberapa pelajaran yang disampaikan di pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Al-Qodiri lainnya, materi keadilan selalu disampaikan kepada santri. Pemberian hak yang semestinya kepada semua santri yang menunaikan kewajibannya, dan pemberian sanksi kepada semua santri yang tidak menunaikan kewajiban atau melanggar peraturan yang ditetapkan tanpa tebang pilih, adalah bagian dari upaya penanaman nilai-nilai keadilan pada diri santri di Peantren Al-Qodiri.

Berdasar diskripsi di atas dapat disimpulkan, baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang penting nilai keadilan dalam pembelajaran di pesantren. Kedua pesantren tersebut dinilai merespon dan menerapkan nilai keadilan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang penting pendidikan multikultural, dan menganggapnya perlu untuk diajarkan di pesantren. Pemikiran tersebut karena realitas kehidupan, seseorang pasti akan bersinggungan dengan berbagai macam perbedaan. Namun bagaimana cara menerapkannya, terdapat perbedaan antara keduanya. Bagi Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, pengajaran pendidikan

multikultural cukup dengan menyelipkannya pada mata pelajaran-mata pelajaran yang sudah ada, melatihkannya pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan menanamkannya pada interaksi kehidupan sehari-hari. Namun bagi Pondok Pesantren Al-Qodiri, di samping cara di atas perlu disusun buku khusus tentang pendidikan multikultural yang nantinya akan diajarkan kepada santri dalam mata pelajaran yang khusus pula.

Walaupun secara umum Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah menganggap penting pendidikan multikultural, namun keduanya mempunyai respon implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural yang tidak selalu sama. Terkait nilai toleransi, secara umum Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari merespon positif pembelajaran nilai toleransi di pesantren. Namun dalam kaitan toleransi antar umat beragama respon yang diberikan Pondok Pesantren Al-Qodiri dinilai lebih baik. Sebaliknya dalam kaitan toleransi antar aliran dalam sesama umat beragama Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari dinilai lebih baik. Sedangkan toleransi terkait perbedaan suku, budaya, dan golongan yang berbeda dinilai sama-sama baiknya. Terkait nilai demokrasi, walaupun Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari pada dasarnya tidak menolak nilai-nilai demokrasi, namun respon dan penerapan demokrasi di Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari dinilai lebih baik. Adapun terkait nilai persamaan/kesetaraan, baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang penting nilai

persamaan dalam pembelajaran di pesantren. Kedua pesantren tersebut dinilai merespon dan menerapkan nilai kesetaraan dengan sama baiknya. Sedangkan terkait dengan nilai keadilan, baik Pondok Pesantren Al-Qodiri ataupun Pondok Modern Muhammadiyah Pakusari, semua memandang penting nilai keadilan dalam pembelajaran di pesantren. Kedua pesantren tersebut dinilai merespon dan menerapkan nilai keadilan dengan sama baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. "Kebenaran, dan Relativitas Sebuah Pengantar." Dalam *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim Tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif*, edited by Gregory Baum. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.
- Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Banks, James A., and Cherry A. McGee Banks. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston: Allyn and Bacon, 1989.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2002.
- Ismail SM. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Madjid, Nurcholis. *Pluralitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman. Jakarta*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001.
- Pribadi, Dawam, and Jamali Sahrodi. "Pendidikan Multikultural: Menggagas Kedamaian Ragam

- Potensi Dan Komunitas Pendidikan.” *Lektur Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2005).
- Salmiati. “Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural.” *Jurnal Al-Ta’lim* 20, no. 1 (2013).
- Sirry, Mun’in A. *Membendung Militansi Agama Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Suaedy, Ahmad, ed. *Pergulatan Pesantren Dan Demokratisasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Yamin, Moh., and Vivi Aulia. *Meretas Pendidikan Toleransi; Pluralisme dan Multikulturalisme Sebuah Keniscayaan Peradaban*. Malang: Madani Media, 2011.
- Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.